

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang terjadi secara terus menerus dan bersifat dinamis. Adanya pembangunan ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan riil masyarakat yang berlangsung dalam jangka panjang (Badri, 2015). Pembangunan ekonomi dilakukan secara menyeluruh, artinya pembangunan ekonomi tidak hanya dilakukan pada lingkup nasional saja, tetapi juga dilakukan dalam lingkup regional atau daerah. Apalagi daerah di Negara Indonesia memiliki banyak potensi untuk untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses pembangunan yang dilakukan antara pemerintah daerah dan masyarakat, yang membentuk mitra kerjasama untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Tumangkeng, 2018). Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi masyarakat serta peran dari pemerintah daerah, untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dalam rangka menggali potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, Arsyad (dalam Tumangkeng, 2018).

Pembangunan ekonomi daerah memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan jenis serta jumlah peluang kerja untuk masyarakat. Pemerintah Daerah harus bisa memperkirakan seluruh potensi sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan utama tersebut. Secara bersama-sama masyarakat beserta pemerintah daerah harus memiliki inisiatif untuk pembangunan

daerahnya. Oleh karena itu diperlukan partisipasi masyarakat dan peran pemerintah daerah dalam mengelola dan mengeksplorasi sumberdaya yang ada, untuk membangun dan merancang perekonomian daerah, Arsyad (dalam Tumangkeng, 2018). Pembangunan daerah khususnya desa perlu untuk dilakukan dalam upaya pembangunan nasional, dikarenakan mayoritas penduduk bermukim di daerah pedesaan, sehingga desa memiliki peran penting dalam penciptaan stabilitas nasional, Sa'adullah (dalam Agunggunanto, dkk, 2016). Dalam pembangunan negara desa dinilai strategis, dikarenakan desa menjadi salah satu dasar dalam identifikasi permasalahan yang ada di masyarakat sampai dengan perencanaan, serta mewujudkan tujuan negara yang berada pada tingkat desa (Sidik, 2016).

Untuk mengimplementasikan pembangunan desa, maka pemerintah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola potensi sumber daya yang ada di daerah masing-masing. Salah satu bentuk upaya pemerintah melakukan pemberian kewenangan kepada desa untuk mengelola potensi desa yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa pengaturan desa salah satunya bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama.

Budiono (2015) menjelaskan salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa yaitu dengan memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuan dari Badan Usaha Milik Desa yaitu mengelola aset-aset yang dimiliki oleh desa,

memajukan perekonomian desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa itu sendiri yaitu meliputi keterbukaan, partisipatif, kejujuran, dan berkeadilan. Sedangkan fungsi dari Badan Usaha Milik Desa itu sendiri yaitu sebagai roda penggerak perekonomian desa, lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD), dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Amelia, 2014).

Pada tahun 2015 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) menargetkan mengenai pendirian dan pengembangan 5.000 Badan Usaha Milik Desa di tanah air. Diharapkan setiap desa nanti juga bisa memiliki Badan Usaha Milik Desa sendiri. Hingga lama kelamaan jumlah Bumdes di Indonesia semakin meningkat, Kementerian Desa mencatat selama 5 tahun terakhir jumlah Bumdes mengalami peningkatan yaitu ditahun 2014 terdapat 1.022 unit Bumdes, 2015 terdapat 11.945 unit Bumdes, 2016 terdapat 18.446 unit Bumdes, 2017 terdapat 39.149 unit Bumdes, dan tahun 2018 terdapat 45.549 unit Bumdes. Dari data diatas dapat menunjukan bahwa semakin banyak desa yang berinovasi untuk menggerakan perekonomian masyarakat di Desa dengan melihat potensi yang dimiliki oleh masing masing desa. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) Eko Putro Sandjojo menjelaskan, meskipun jumlah Badan Usaha Milik Desa semakin meningkat tidak semua Badan Usaha Milik Desa manajemen berjalan maksimal, hal ini dikarenakan masih terkendala dengan Sumber Daya Manusia yang masih belum mumpuni untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola potensi yang ada

didaerahnya. Ketidakmaksimalan Badan Usaha Milik Desa yang dikarenakan terkendala Sumber Daya Manusia di dukung hasil penelitian dari Ibrahim, dkk (2019) dengan judul penelitian “Faktor Penghambat dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas di Sumbawa Barat”, yang menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat ketidakmaksimalan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yaitu adanya kendala anggaran, masih rendahnya Sumber Daya Manusia, dan faktor dukungan baik dari masyarakat maupun pemerintah.

Dari berbagai daerah di Indonesia, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencatat, bahwa Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak Badan Usaha Milik Desa yakni terdapat 6.083 Badan Usaha Milik Desa yang berdiri.

Tabel 1.1 Jumlah Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Timur Tahun
2018

No.	Wilayah	Jumlah Bumdes
1	Kabupaten Kediri	343
2	Kabupaten Bojonegoro	322
3	Kabupaten Gresik	319
4	Kabupaten Jombang	301
5	Kabupaten Ponorogo	281
6	Kabupaten Mojokerto	275
7	Kabupaten Bangkalan	273
8	Kabupaten Sumenep	268
9	Kabupaten Nganjuk	264
10	Kabupaten Lamongan	256
11	Kabupaten Tulungagung	255
12	Kabupaten Tuban	232
13	Kabupaten Jember	222
14	Kabupaten Blitar	220
15	Kabupaten Malang	217
16	Kabupaten Probolinggo	211
17	Kabupaten Madiun	195
18	Kabupaten Ngawi	182
19	Kabupaten Magetan	169
20	Kabupaten Sidoarjo	164
21	Kabupaten Trenggalek	153
22	Kabupaten Pasuruan	149
23	Kabupaten Banyuwangi	147
24	Kabupaten Pamekasan	135
25	Kabupaten Lumajang	131
26	Kabupaten Bondowoso	118
27	Kabupaten Sampang	99
28	Kabupaten Pacitan	93
29	Kabupaten Situbondo	70
30	Kota Batu	19
Jumlah		6.083

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur (data diolah).

Dari data jumlah Badan Usaha Milik Desa di Jawa Timur, daerah yang memiliki 6.083 Badan Usaha Milik Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencatat bahwa, sebagian besar daerah di Jawa Timur memiliki

banyak Badan Usaha Milik Desa, dengan berbagai macam klasifikasi, ada yang masih terklasifikasi sebagai pemula, berkembang, dan maju. Badan Usaha Milik Desa yang terklasifikasi pemula sebanyak 3.336, terklasifikasi berkembang sebanyak 2.278, untuk yang terklasifikasi maju sebanyak 469. Jenis usaha Badan Usaha Milik Desa ada berbagai macam jenisnya yang meliputi simpan pinjam, perdagangan, jasa, pertanian, HIPDAM, peternakan, pasar desa, samprodi, persewaan, lumbung pangan, kerajinan, agrowisata, dan bank sampah (Dinas PMD Jawa Timur, 2018). Badan Usaha Milik Desa kebanyakan mengelola potensi desa dengan berbasiskan masyarakat, artinya untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa itu melibatkan partisipasi dari masyarakat. Badan Usaha Milik Desa sekarang banyak memanfaatkan potensi desa untuk dijadikan pariwisata berupa desa wisata yang dikelola oleh masyarakat di daerah desa itu sendiri. Pendirian desa wisata ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

Pembangunan sebuah kawasan dijadikan tempat wisata bagi masyarakat diharuskan adanya pengelolaan lingkungan yang baik, karena dengan pengelolaan lingkungan yang baik dan bersih dapat menarik kunjungan wisatawan. Kebersihan lingkungan tempat wisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelolanya saja, tetapi juga diperlukan keterlibatan partisipasi dari masyarakat disekitar tempat wisata tersebut. Adanya fenomena pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, karena adanya kritik atas pengelolaan wisata yang dilakukan tanpa keterlibatan masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) adalah pengelolaan pariwisata yang memerlukan serta mendepankan partisipasi masyarakat, serta memberikan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup

aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, (Purmada, dkk, 2016). Selaras dengan pendapat dari Suansri (2018) wisata Berbasis Komunitas (*Community Based Tourism*) adalah pariwisata yang memperhatikan keberlanjutan aspek lingkungan, sosial, dan budaya, serta salah satu alat untuk mengembangkan masyarakat dan lingkungan konservasi atau dengan kata lain *Community Based Tourism* adalah alat yang digunakan dalam membangun pariwisata berkelanjutan. Ciri-ciri khusus dari *Community Based Tourism* menurut Hudson dalam Timothy (dalam A'inun, dkk, 2014) berkaitan dengan manfaat yang didapatkan masyarakat serta adanya upaya pendampingan dan perencanaan yang memihak masyarakat lokal setempat, dan adanya kelompok yang memberikan pengawasan dalam mewujudkan kesejahteraan

Salah satu model pariwisata yang harus dikembangkan adalah pariwisata yang berdasarkan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Model pariwisata ini bisa diaplikasikan apabila dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam pembentukan desa wisata. Pemberdayaan masyarakat diharapkan akan menambah wawasan dan kemampuan masyarakat dalam hal kepariwisataan. Konsep yang ditawarkan dalam pengembangan desa wisata adalah *Community Based Tourism* atau pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. *Community Based Tourism* adalah pengelolaan pariwisata yang menitikberatkan partisipasi masyarakat yang mencakup aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya ke dalam satu kemasan. Pengelolaan berbasis masyarakat ini dikelola oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, dimana *Community Based Tourism* memberikan peluang yang sebesar- besarnya kepada masyarakat desa untuk terlibat dan berpartisipasi dalam

pembangunan pariwisata. *Community Based Tourism* merupakan salah satu bentuk pengelolaan pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat langsung dalam pengelolaan dan pembangunan pariwisata, masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata juga mendapatkan keuntungan, Garrod (dalam A'inun, dkk, 2014).

Community Based Tourism merupakan kegiatan pembangunan pariwisata yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. seluruh ide kegiatan dan pengelolaan dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Dengan demikian, dalam *Community Based Tourism* peran masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan merupakan unsur terpenting dalam pengembangan pariwisata.

Penerapan pariwisata berbasis masyarakat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat berupa peningkatan kesejahteraan, perlindungan terhadap lingkungan, kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Penerapan konsep *Community Based Tourism* diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru yang lebih luas, serta dapat menyerap dan memanfaatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan pengelolaan destinasi wisata, karena semua kegiatannya dilakukan oleh masyarakat. Salah satu langkah bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada didaerahnya serta dapat mengelola pariwisatanya sendiri dan menjadikan desa mereka sebagai desa mandiri, dapat menerapkan konsep pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism*

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (2018) mengatakan itu Desa wisata merupakan desa yang memiliki daya tarik yang khas (daya tarik

yang dimaksud ini, bisa dalam bentuk keunikan fisik lingkungan pedesaan, serta kehidupan sosial budayannya orang) yang dikemas secara alami dan menarik. Pembangunan desa wisata membutuhkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki pariwisata tersebut secara bersama-sama, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat keberadaan desa wisata di wilayahnya sendiri (A'inun, dkk, 2014).

Salah satu desa wisata yang menerapkan *Community Based Tourism* yaitu Desa Wisata Gronjong Wariti yang terletak di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Desa wisata Gronjong Wariti ini di dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Hapsari. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis secara langsung, masyarakat maupun Pemerintah Desa Mejono berusaha mengoptimalkan potensi desa yang terpendam yaitu Desa Wisata Gronjong Wariti, desa wisata yang memanfaatkan air sungai sebagai wisata andalan. Potensi desa Gronjong Wariti yang awalnya luput dari perhatian, sekarang telah memiliki omzet puluhan juta perbulan. Sesuai dengan namanya, Gronjong Wariti yang memiliki arti Sungai Kehidupan, setelah berdirinya desa wisata Gronjong Wariti ini, perekonomian warga semakin meningkat, karena dengan adanya desa wisata Gronjong Wariti ini menambah pemasukan ekonomi bagi warga sekitar. Secara prospektif desa wisata Gronjong Wariti ini cukup baik, dimana pada tahun 2019 desa wisata Gronjong Wariti menjadi pemenang dengan kategori desa wisata dalam anugrah 2019, penghargaan pengelolaan pariwisata terbaik di Kabupaten Kediri dan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 200.000.000. Desa wisata ini cukup menarik, dimana desa wisata Gronjong Wariti ini masih terbilang desa wisata terbaru, tetapi desa wisata ini sudah mampu

memenangkan kategori pengelolaan pariwisata terbaik, dan patut dijadikan contoh desa lainya untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki desannya.

Model pengelolaan desa wisata Gronjong Wariti dengan konsep *Community Based Tourism*, yang mengedapankan partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengelolaannya baik dari aspek sosial budaya, aspek lingkungan, dan aspek ekonomi. Desa Wisata Gronjong Wariti ini bisa mendapatkan penghargaan dengan kategori pengelolaan pariwisata terbaik di Kabupaten Kediri karena desa wisata ini menerapkan sistem pengelolaan manajemen terbuka, artinya pengelolaan desa wisata Gronjong Wariti ini dikelola secara transparan, dimana semua kalangan diperbolehkan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan perkembangan setiap bulanya di desa wisata Gronjong Wariti ini, terdapat evaluasi tiap bulannya, tidak ada tarif atau tiket untuk masuk desa wisata ini, selain itu banyaknya pengunjung yang datang ke desa wisata Gronjong Wariti ini, hal itulah yang menjadikan desa wisata Gronjong Wariti mendapatkan penghargaan pengelolaan pariwisata terbaik seKabupaten Kediri.

Desa Wisata Gronjong Wariti ini lahir, karena adanya kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Desa wisata yang di *launching* pada tahun 2017 ini, awal mulanya kondisinya sangat memprihatinkan. Banyak sampah berserakan di area sepanjang sungai ini. Namun, berkat solidaritas beberapa warga sekitar, sungai ini pun bisa terselamatkan. Bahkan, sekarang bisa menjadi wisata air dengan potensi nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Bahkan desa wisata ini sudah mampu menyerap tenaga kerja bagi masyarakat sekitar. Masyarakat dan pengelola di desa wisata Gronjong Wariti ini mengaku bahwa dengan adanya wisata ini dapat menambah

pemasukan pendapatan. Adanya wahana yang menarik dan memiliki keunikan tersendiri, membuat desa wisata Gronjong Wariti ini dijadikan tepat tujuan wisatawan untuk melakukan pariwisata. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke desa wisata Gronjong Wariti.

Dalam satu bulan jumlah wisata yang mengunjungi lokasi wisata ini rata-rata mencapai 1.000-10.000 ribu pengunjung. Pengunjung desa wisata Gronjong Wariti ini berasal dari berbagai kalangan terutama anak kecil yang masih bersekolah TK. Banyaknya pengunjung ke desa wisata Gronjong Wariti ini tidak terlepas dari keberagaman wahana wisata yang ditawarkan. Ketua pengelola desa wisata mengatakan, bahwa desa wisata Gronjong wariti ini akan terus dikembangkan dengan menambah wahana baru untuk menarik lebih banyak lagi pengunjung, dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningktan Pendapatan Asli Desa (PAD). Badan Usaha Milik Desa Hapsari Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri mencatat, desa wisata Gronjong Wariti juga berkontribusi terhadap Pendapatan Asli desa (PADes), berikut kontribusi desa wisata Gronjong Wariti terhadap Penadapatan Asli Desa:

Tabel 1.2 Kontribusi Pendapatan Desa Wisata Gronjong Wariti Terhadap Pendapatan Asli Desa

Tahun	Kontribusi Dari Wisata	Pendapatan Asli Desa	Presentase
2018	Rp. 692.000	Rp. 1000.000	69,2%
2019	Rp. 10.005.100	Rp. 16.392.200	61,0%
2020	Rp. 12.398.000	Rp. 27.600.320	44,9%

Sumber : Badan Usaha Milik Desa Hapsari, (data diolah)

Ditahun 2018 berkontribusi sebesar Rp.692.000, ditahun 2019 berkontribusi sebesar Rp.10.005.000, dan ditahun 2020 berkontribusi sebesar Rp.12.398.000. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan desa wisata

Gronjong Wariti berdampak pada pendapatan asli desa dan dapat menjadikan Desa Mejono menjadi lebih mandiri karena memiliki penghasilan sendiri dan tidak menggantungkan dana dari pemerintah pusat, hal ini dapat dilihat bahwa kontribusi desa wisata terhadap pendapatan asli desa semakin meningkat tiap tahunnya. Untuk mengelola desa wisata Gronjong Wariti ini akan dioptimalkan pada keterlibatan dan partisipasi masyarakat dan anak muda sebagai motor penggeraknya.

Akan tetapi pada kenyataannya perjalanan desa wisata Gronjong Wariti masih mengalami kendala yaitu, masih mengalami hambatan, salah satu hambatan yang dialami dalam pengelolaan Wisata Gronjong Wariti yaitu masih rendahnya Sumber Daya Manusia. rendahnya Sumber Daya Manusia ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak mau berpartisipasi dalam pengelolaan Wisata Gronjong Wariti.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu bagian dari modal sosial. Modal sosial adalah kemampuan individu atau kelompok dalam menggunakan sumberdaya yang ada dimasyarakat. Modal sosial menjadi akses yang sebenarnya, secara ekonomi memiliki peran dalam meningkatkan kelangsungan hidup masyarakat, serta memiliki peran penting dalam proses pembangunan masyarakat, modal sosial meliputi kelembagaan masyarakat lokal, nilai serta norma masyarakat, kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. Modal sosial menjadi sarana dalam menjelaskan masyarakat melakukan kerjasama. Coleman mengatakan bahwa dalam modal sosial, terdapat 3 unsur yang merupakan pilar utama modal sosial. Pilar yang pertama yaitu terkait dengan adanya rasa saling percaya antara seseorang atau kelompok, yang dapat memunculkan rasa memiliki

kewajiban dan harapan pada suatu kegiatan. Pilar yang kedua berkaitan dengan pentingnya arus informasi dan komunikasi yang lancar, yang dapat mendorong berkembangnya kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat, karena arus informasi adalah bentuk interaksi sosial antar masyarakat. Arus informasi menjadi sesuatu yang penting dalam masyarakat, karena arus informasi yang tidak lancar dapat menimbulkan seseorang atau kelompok menjadi ragu-ragu atau tidak tahu sehingga tidak berani untuk melakukan sesuatu. Pilar ketiga adanya norma-norma yang harus ditaati dan sanksi yang jelas. Tanpa adanya seperangkat norma yang ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, dapat memunculkan anomie, suatu keadaan dimana seseorang bertindak menurut kemauannya sendiri tanpa merasa memiliki ikatan dengan orang lain (Herdiyanti, 2017).

Berdasarkan informan yang peneliti temui, rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam mengelola desa wisata Gronjong Wariti ini, karena Sumber Daya Manusia yang masih rendah, kurangnya pemahaman, dan rasa cemburu serta curiga antar masyarakat yang masih tinggi dalam mengelola desa wisata Gronjong Wariti yang berbasis masyarakat ini. Maka dari itu diperlukan interaksi sebagai bentuk komunikasi masyarakat yang lebih intens lagi. Sesungguhnya masyarakat dapat mengalami perubahan sosial jika didukung dengan informasi dan komunikasi yang aktif. Arus informasi yang lebih dinamis yang dilakukan melalui komunikasi antar masyarakat merupakan salah satu cara yang dapat mendorong terciptanya partisipasi. Arus informasi yang tidak lancar akan menyebabkan sikap masyarakat menjadi apatis, sehingga berdampak pada rendahnya rasa percaya pada masyarakat.

Rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam mengelola desa wisata Gronjong Wariti ini juga dilatarbelakangi masih tingginya rasa kecurigaan yang memunculkan rasa tidak percaya pada masyarakat. Masyarakat tidak akan percaya sebelum adanya bukti. Kecurigaan muncul karena kurangnya partisipasi dan interaksi yang dibangun oleh masyarakat, sehingga menimbulkan rasa khawatir dan takut pada masyarakat. Kecurigaan yang muncul mengakibatkan masyarakat enggan untuk ikut mengelola desa wisata. Rasa saling percaya antar masyarakat perlu dilakukan, karena tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan masyarakat. Sedangkan pilihan rasional menjadi tolak ukur tinggi rendahnya tingkat kepercayaan seseorang dalam menjalin kerjasama. Pilihan rasional bersifat individu yang memungkinkan seseorang memilah hubungan untuk melakukan kerjasama. Masyarakat memiliki pilihan yang dianggap rasional untuk membantu perekonomiannya dengan cara lebih memilih pekerjaan tetap yang dimilikinya. Rasa saling percaya menjadi dasar dalam mencapai tujuan bersama, John Fiel (dalam Herdiyanti, 2017). Rasa saling percaya akan memudahkan masyarakat dalam membangun kerjasama. Pilihan rasional menjadi faktor dalam menentukan hubungan kerjasama antar yang satu dengan yang lain. Kerjasama tidak akan terjadi apabila tidak adanya rasa saling percaya antar sesama antar pihak.

Masyarakat yang ikut berpartisipasi untuk mengelola desa wisata Gronjong Wariti ini dilatarbelakangi karena rasa saling memiliki, bahwa untuk mengelola desa wisata Gronjong Wariti ini adalah kewajiban bersama untuk mengembangkan potensi yang ada didesanya, adapula yang berpartisipasi

karena merasa mendapatkan keuntungan jika ikut berpartisipasi untuk mengelola desa wisata Gronjong Wariti ini.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai bagaimana bentuk penerapan pengelolaan desa wisata Gronjong Wariti berbasis masyarakat, dengan judul **“Pengelolaan Desa Wisata Gronjong Wariti Dengan Konsep *Community Based Tourism*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana bentuk pengelolaan desa wisata Gronjong Wariti dengan konsep *Community Based Tourism*?

1.3 Tujuan

Dari rumusan masalah diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui model penerapan dalam pengelolaan desa wisata Gronjong Wariti dengan konsep *Community Based Tourism*.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan didalam bidang ilmu ekonomi pembangunan terkait dengan teori rasionalitas, khususnya dalam hal pengelolaan pariwisata yang berbasis masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rekomendasi untuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa terutama pengelolaan pariwisata.

b. Masyarakat

Diharapkan dengan penelitian ini, model pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat ini dapat dijadikan sebagai model pengelolaan pariwisata yang bisa direplikasikan.